

PENETAPAN KEABSAHAN NASAB ANAK
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syariah Negeri Johor)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SITI NURFAIEZAH MASRIZAN

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 210101124

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH

2024 M/ 1446

PENETAPAN KEABSAHAN NASAB ANAK
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syariah Negeri Johor)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

SITI NURFAIEZAH MASRIZAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum keluarga
NIM 210101124

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., MH
NIP: 198012052011011004



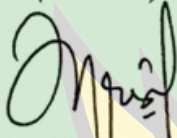
Muhammad Husnul, S.Sv., M.H.I.
NIP 19906122020121013

PENETAPAN KEABSAHAN NASAB ANAK
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syariah Negeri Johor)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum keluarga
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 29 November 2024 M
27 Jumadil Awal 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., MH
NIP: 198012052011011004

Sekretaris,



Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP 19906122020121013

Penguji I



Fakhurrizi M. Yunus, Lc., M.A.
NIP: 197702212008011008

Penguji II



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP: 198101222014032001

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurfaiezah Masrizan
NIM : 210101124
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

A R - R A N I R Y

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 November 2024

Yang menerangkan



Siti Nurfaiezah Masrizan

ABSTRAK

Nama : Siti Nurfaiezah Masrizan
NIM : 210101124
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Penetapan Keabsahan Nasab Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syariah Negeri Johor)
Tanggal Sidang : 29 November 2024
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., MH
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
Kata Kunci : Penetapan Nasab Anak Luar Nikah, Mahkamah Syariah, Masalah Mursalah

Penetapan nasab anak luar nikah merupakan masalah yang sangat serius dalam hukum syariah karena berhubungan langsung dengan penentuan hak-hak dasar anak tersebut. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama, yaitu pertama, apa alasan pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan nasab anak luar nikah setelah beberapa tahun pernikahannya. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Johor dalam memutuskan perkara penetapan keabsahan nasab anak luar nikah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, Enakmen Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Johor No.16 Tahun 2003 dan Enakmen Keluarga Islam Negeri Johor No.17 Tahun 2003 serta wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama pengajuan permohonan adalah untuk mendapatkan kejelasan hukum status anak, terutama dalam hak-hak dan tanggung jawab orang tua. Bukti tes DNA dan pengakuan perselingkuhan menjadi faktor utama dalam menentukan status nasab anak. Dalam perspektif hukum syariah, konsep istilhaq dan ilhaq memainkan peran penting. Istilhaq, sebagai pengakuan pria terhadap seorang anak, digunakan sebagai langkah hukum untuk menegaskan nasab, sedangkan ilhaq, proses penyambungan nasab berdasarkan bukti syar'i seperti firasy atau DNA, menjadi dasar pertimbangan hakim. Hakim mempertimbangkan prinsip masalah mursalah untuk memastikan kepentingan umum dan keadilan sosial terjaga. Dapat disimpulkan bahwa konsep istilhaq, ilhaq, dan masalah mursalah membantu menjamin perlindungan hak anak luar nikah, memberikan kepastian hukum, dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Kajian ini juga mencerminkan tantangan penerapan hukum Islam di tengah perkembangan sosial dan teknologi modern.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan kurnia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyiapkan tugas akhir ini, shalawat dan salam dipanjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang telah mengantarkan kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Penetapan Keabsahan Nasab Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syariah di Johor)”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ahli keluarga terutama ibu saya Normala dan ayah saya Masrizan yang banyak mendoakan saya, menyokong keberadaan saya untuk melanjutkan kuliah sebagai S1 di Aceh, dan tidak lupa juga kepada suami saya Mohd Azri juga banyak membantu cari maklumat mengenai kasus saya, rakan-rakan seperjuangan saya yaitu rakan satu rumah pak saifuddin, tidak lupa juga batch Jadzwah yang sama-sama berjuang dengan skripsi dan banyak memberi sokongan serta semangat kepada saya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., MH sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I. sebagai Pembimbing II yang tidak pernah rasa letih untuk bimbingan.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta staffnya.

3. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, tak lupa juga Bapak Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A. sebagai Penasehat akademik dan seluruh staff yang ada di Prodi Hukum.
4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan seluruh perkerja perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.

Demikian pengantar yang dapat disampaikan dimana penulis sadar bawasannya penulis hanyalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Azza Wa'jala hingga dalam penulisan dan penyusunannya masih jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis berharap, bahwa dibalik ketidaksempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini ditemukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat serta hikmah bagi penulis dan pembaca bagi seluruh mahasiswa UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 23 September 2024

Penulis,

Siti Nurfaiezah Masrizan

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	

10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	هـ	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ-	<i>Fathah</i>	A
ِ-	<i>Kasrah</i>	I
ُ-	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ... يْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ... وْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذُكِرَ - *žukira*
 يَذْهَبُ - *yažhabu*
 سُئِلَ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَؤُلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al-atfāl*
- *raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:



تَأْخُذُونَ	- ta' khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٍ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khaṭīl*

-*Ibrāhīmūl-Khaṭīl*

بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاَهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā ‘a ilahi sabīla*

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

-*Lillaṣī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laṣi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laṣi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمِائَةِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*
- *Lillāhil-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

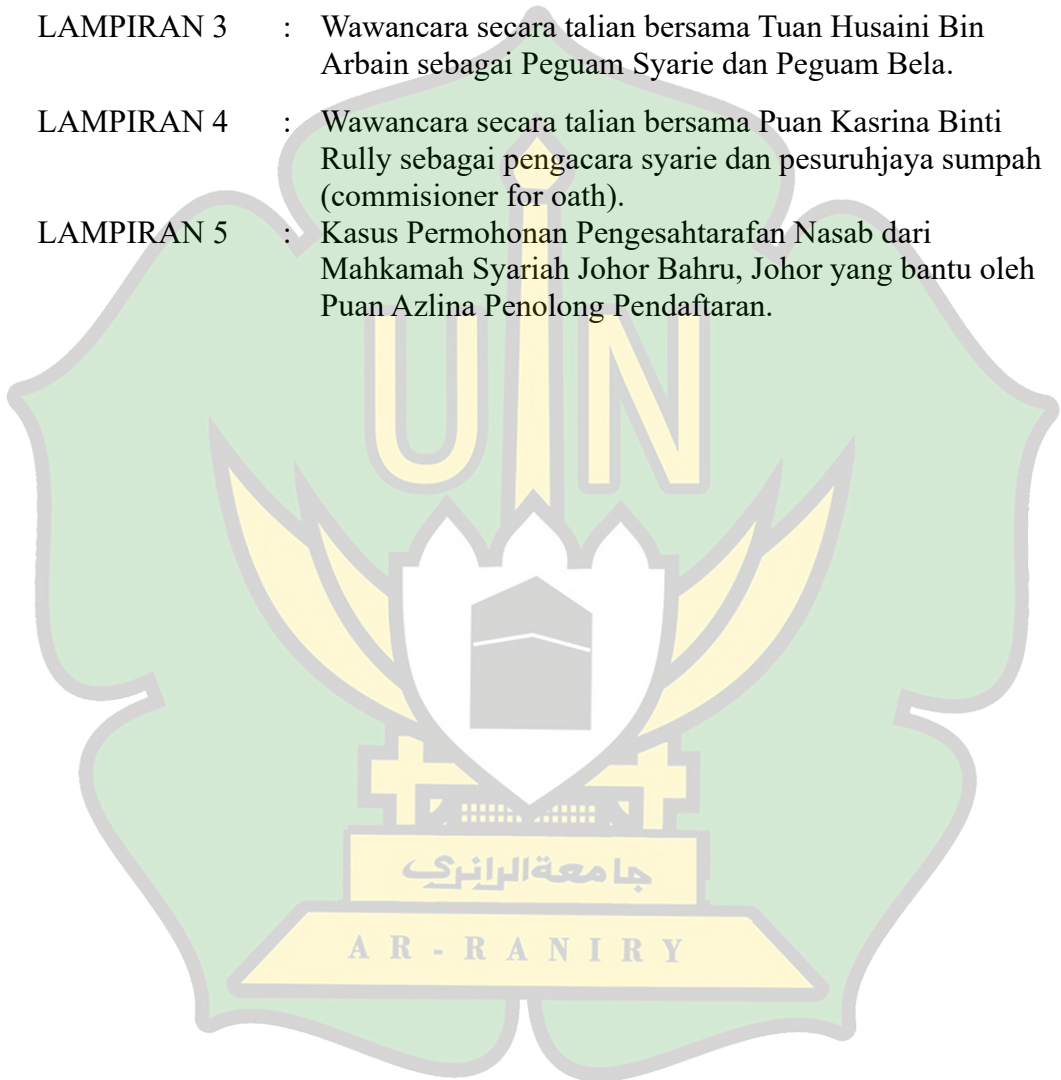
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Penepatan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiwa Dari Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
- LAMPIRAN 3 : Wawancara secara talian bersama Tuan Husaini Bin Arbain sebagai Peguam Syarie dan Peguam Bela.
- LAMPIRAN 4 : Wawancara secara talian bersama Puan Kasrina Binti Rully sebagai pengacara syarie dan pesuruhjaya sumpah (commisioner for oath).
- LAMPIRAN 5 : Kasus Permohonan Pengesahatarafan Nasab dari Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor yang bantu oleh Puan Azlina Penolong Pendaftaran.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Peneltian.....	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Objektivitas dan Validasi.....	12
6. Teknik Analisis Data	12
7. Pedomen Penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB DUA KONSEP PENETAPAN NASAB ANAK DALAM FIKIH DAN UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM JOHOR

A. Pengertian Penetapan Nasab Anak.....	14
B. Pengertian Anak Luar Nikah.....	19
C. Dasar Hukum Penetapan Nasab Anak Luar Nikah	27
D. Kemaslahatan Penetapan Nasab Anak Luar Nikah.....	34

BAB TIGA PENETAPAN NASAB ANAK DI MAHKAMAH SYARIAH JOHOR

A. Mahkamah Syariah Johor, Malaysia	46
B. Alasan-alasan Pemohon Mengajukan Penetapan Nasab Anak luar Nikah.....	47
C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Johor dalam Perkara Penetapan Nasab Anak Di Luar Nikah	53

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73
DAFTAR LAMPIRAN.....	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor, tercatat hanya 12 kasus mengenai pengesahan nasab anak yang diajukan antara tahun 2021 hingga 2024. Kasus-kasus ini menggambarkan pentingnya penetapan nasab dalam konteks hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan status keabsahan nasab anak yang lahir dalam situasi yang kompleks. Pada tahun 2021, hanya dua orang penggugat (suami) yang mengajukan permohonan tersebut. Jumlah ini meningkat pada tahun 2022 dengan tiga penggugat, dan pada tahun 2023, kasus ini melibatkan seorang pria dan seorang wanita yang mengajukan. Pada tahun 2024, permohonan pengesahan nasab ini diajukan oleh seorang laki-laki dan empat perempuan. Ke-12 kasus tersebut memperlihatkan tingginya relevansi dan kompleksitas persoalan nasab dalam kehidupan sosial dan perundang-undangan Islam yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Mahkamah Syariah Johor ia menggunakan Enakmen No.17 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 dan Enakmen No.16 Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 yang terdapat beberapa persediaan penting yang mengatur aspek-aspek kehidupan keluarga dalam konteks Islam yaitu perkawinan, perceraian, nafkah, penitipan anak, dan perkara-perkara lain. Enakmen ini berfungsi untuk memberikan panduan yang jelas dan komprehensif bagi muslim di Johor mengenai isu-isu kekeluargaan, dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan berkeluarga.

Penentuan nasab dalam Islam memang merupakan salah satu hal penting dalam menjaga kesinambungan keturunan dan mempertahankan marwah keluarga. Nasab bukan hanya memainkan peranan dalam aspek keturunan, tetapi

juga dalam perwalian, kewarisan, pergaulan, nafkah, dan perkawinan.¹ Firman Allah SWT dalam Surah al-Ahzaab ayat 5 jelas menyatakan bahwa anak-anak angkat hendaklah di bin atau di binti kan kepada ayah mereka sendiri, kerana itu lebih adil di sisi Allah:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Maksudnya: Panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri, cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. (QS. Al-Ahzaab (33) : 5)

Selain itu, firman Allah dalam Surah al-Ahzaab ayat 6 juga menekankan pentingnya hubungan kerabat dalam aspek pewarisan:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Bermaksud: Dan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak (mewarisi) akan setengahnya yang lain menurut (hukum) kitab Allah. (QS. Al-Ahzaab (33): 6)

Ayat ini memperjelaskan lagi bahawa nasab adalah asas yang digunakan dalam pembahagian harta pusaka mengikut hukum syarak. Pertalian darah dan hubungan keluarga secara sah adalah penentu hak-hak waris, dan ini merupakan cara Islam menjaga keadilan dalam hubungan sosial dan kekeluargaan. Dengan ini, pemeliharaan nasab memainkan peranan penting bukan hanya untuk memastikan kesucian keturunan tetapi juga dalam menjaga keadilan sosial dan hak-hak individu di dalam keluarga.

Berdasarkan perincian nas-nas al-Quran dan hadis sahih, terdapat beberapa mekanisme yang disepakati oleh para ulama dalam menentukan nasab, iaitu *firasy*, pengakuan, dan penyaksian. Namun, dengan perkembangan sains, penggunaan DNA dalam penentuan nasab turut dibahaskan dan dipersetujui oleh sarjana Islam. DNA (*Deoxyribonucleic acid*) merupakan komponen utama kromosom yang mengandungi informasi genetik, yang diwariskan dari ibu ayah

¹ Tengku Fatimah Muliana Tengku Muda, Siti Khatijah Ismail, Najmiah Omar, "Penggunaan DNA Bagi Penentuan Nasab al-Walad Li al- Firasy dalam Peruntukkan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari Keluaran Khas*, 2011, hlm. 18.

kepada anak melalui proses reproduksi. Rekayasa genetik telah memungkinkan hubungan nasab antara orang tua dan anak dipastikan dengan lebih tepat melalui analisis DNA.² Dalam surah Al-Insan ayat 2 ada menggambarkan proses manusia dari elemen dasar dan bisa dihubungkan dengan pemahaman bahwa DNA adalah komponen yang membawa informasi genetik yang penting dalam penciptaan dan perkembangan.

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Maksudnya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan) sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat. (QS. Al-Insan (76) : 2)

Di Malaysia, penentuan garis keturunan anak didasarkan pada konsep *al-firasy*, yang merujuk kepada status pernikahan yang sah. Anak hanya dapat dinasabkan kepada suaminya jika kehamilan terjadi lebih dari enam bulan setelah pernikahan atau dukhul (persetubuhan setelah akad nikah). Departemen Fatwa Kebangsaan Malaysia mengklasifikasikan anak yang lahir di luar pernikahan sebagai anak hasil hubungan di luar *al-firasy*, termasuk dari perzinahan atau pemerkosaan.³ Anak yang lahir kurang dari enam bulan selepas pernikahan juga dianggap tidak sah taraf kerana tidak memenuhi syarat minimum tempoh kehamilan yang ditetapkan untuk sahnya nasab menurut hukum syarak.

Pada 5 Safar 1425 Hijriah bersamaan dengan 26 Mac 2004, komite Fatwa Negeri Johor telah membuat keputusan penting berkaitan dengan status anak luar nikah mengikut hukum syarak. Anak luar nikah di definisikan sebagai anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sama ada akibat zina atau pemerkosaan, dan bukan hasil dari persetubuhan syubhah atau anak angkat. Selain itu, anak

² *Ibid.*

³ Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, “Bayan Linnas Siri Ke-106: Isu Penamaan “Bin/Binti Abdullah” kepada Anak Tidak Sah Taraf oleh Mahkamah Rayuan”, 2017. Diakses melalui: <https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas/736-bayan-linnas-siri-ke-106-isu-penamaan-bin-binti-abdullah-kepada-anak-tidak-sah-taraf-oleh-mahkamah-rayuan> pada tanggal 1 oktober 2024.

yang dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 lahzah (saat) mengikut takwim qamariah dari waktu persetubuhan pertama selepas akad nikah yang sah juga dikategorikan sebagai anak luar nikah. Komite juga menetapkan bahawa penamaan anak tersebut perlu menggunakan “bin” atau “binti” Abdullah, atau dengan salah satu nama Asma Al-Husna yang dimulai dengan “Abdul” sebagai alternatif bagi anak-anak ini.⁴ Dalam konteks di Mahkamah Syariah Johor, terdapat permasalahan yang muncul mengenai kasus keabsahan nasab seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun setelah beberapa tahun menikah, sang suami mengetahui bahwa anak tersebut bukanlah anaknya dan telah mengajukan pengesahan nasab anak tersebut.

Berdasarkan dari kasus yang diambil di Mahkamah Syariah, penulis telah mendapatkan beberapa kasus yaitu yang pertama nomor kasus 01100-006-0720-2022, kedua, nomor kasus 01100-006-0344-2022 dan kasus ketiga, nomor 0110-006-0285-2021. Dari ketiga kasus tersebut, Mahkamah Syariah menggunakan Enakmen Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003⁵ dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003.⁶ Sekaligus ingin mengetahui bagaimana hakim memutuskan perkara dalam penetapan nasab anak luar nikah. Didalam penulisan ini, penulis akan menerangkan tiga kasus yang terkait dalam permasalahan tersebut. Maka dari permasalahan yang terjadi di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang, **“PENETAPAN KEABSAHAN NASAB ANAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syariah Johor)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua permasalahan yang hendak didalami dalam kajian penelitian ini yaitu:

⁴ Al Irsyad, Jabatan Mufti Johor, “Fatwa Anak Sah Taraf”, 2004. Diakses melalui: https://said.johor.gov.my/perkhidmatan/paparan_detail_fatwa.php?id=91 pada tanggal 23 September 2024.

⁵ Negeri Johor, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003*, Cet. pada April 2024, hlm. 1 – 56.

⁶ Undang-Undang Negeri Johor, *Enakmen No.16 Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003*, Cet. April 2004, hlm. 65 – 82.

1. Apa alasan pemohon mengajukan penetapan nasab anak setelah beberapa tahun pernikahan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Johor dalam memutuskan perkara penetapan keabsahan nasab anak di luar nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dua permasalahan yang diajukan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan pemohon mengajukan penetapan nasab anak setelah beberapa tahun masa pernikahan.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dalam Mahkamah Syariah Johor dalam perkara penetapan nasab anak di luar nikah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang telah digunakan dalam ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan dan untuk tercapainya tujuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan telaah pustaka yang digunakan untuk membantu dan mendukung penyusunan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan mengenai penelitian Penetapan Keabsahan Nasab Anak dalam hukum Islam di Malaysia.

Pertama, jurnal yang ditulis Muhammad Mustaqim Roslan yang berjudul “Impak Penasaban Kepada Abdullah Terhadap Masalah Sosial Anak Tak Sah Taraf” yang diterbitkan International Journal of Al-Quran and Knowledge, Vol. 4, Issue 1, 2024. Membahas dampak Fatwa Kebangsaan yang menetapkan bahwa nasab anak luar nikah dikaitkan dengan "Abdullah" alih-alih nama ibu mereka. Meskipun fatwa ini bertujuan menghindari stigma sosial, artikel ini mengkritik dampak negatif yang dialami anak-anak luar nikah, terutama dalam aspek psikologis dan sosial.⁷

⁷ Muhammad Mustaqim Bin Roslan, “Impak Penasaban Kepada Abdullah Terhadap Masalah Sosial Anak Tak Sah Taraf”, *International Journal of Al-Quran and Knowledge*, Vol. 4, Issue 1, 2024, hlm. 1-14.

Kedua, menurut skripsi Sayyida Chazratud, 2023, dalam skripsinya yang berjudul “Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia”, membahas perbandingan hukum keluarga Islam terkait nasab anak luar nikah di kedua negara. Di Malaysia, nasab anak luar nikah diatur dalam Pasal 111 Enakmen 17 Hukum Keluarga Johor 2003, sementara di Indonesia diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Skripsi ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana kedua negara menangani nasab anak luar nikah dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Ketiga, Zurina Musa dan rakan-rakan yang berjudul “Penasaban dan Pendaftaran Kelahiran Anak Tidak Sah Taraf Orang Islam di Malaysia dan negara Asia Lain”, yang diterbitkan di Jurnal Islammiyyat, Vol 45, Issue 2, 2023. Membahas perbedaan konsep nasab anak luar nikah menurut hukum syariah dan undang-undang sivil di Malaysia. Artikel ini menunjukkan bagaimana perbedaan tersebut berdampak pada pewarisan, perwalian, dan hak-hak anak, serta membandingkan pendaftaran kelahiran anak luar nikah di beberapa negara Asia lainnya seperti Indonesia, Singapura, dan Thailand.⁹

Keempat, menurut skripsi yang ditulis oleh Meor Muaz Bin Meor Nadzri pada tahun 2022,¹⁰ dalam skripsinya “Pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis Tentang Nasab Anak Luar Nikah (Menurut Perspektif Maqasid Syariah)”, membahas bagaimana pandangan Mufti Negeri Perlis berbeda dengan fatwa kebangsaan terkait penetapan nasab anak luar nikah. Skripsi ini mendalami konsep al-firasy dalam hukum Islam serta penerapan Maqasid Syariah untuk mendukung pandangan tersebut.

⁸ Sayyida Chazratud, “*Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*”, (Skripsi dipublikasi), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, hlm. 1-70.

⁹ Zurina Musa dkk, “Penasaban dan Pendaftaran Kelahiran Anak Tidak Sah Taraf Orang Islam di Malaysia dan negara Asia Lain”, *Jurnal Islammiyyat*, Vol 45, Issue 2, 2023, hlm. 15-33.

¹⁰ Meor Muaz Bin Meor Nadzri, “*Pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis Tentang Nasab Anak Luar Nikah (Menurut Perspektif Maqasid Syariah)*”, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm. 16.

Kelima, Oscar Maulana dalam “Penetapan Nasab Anak di Luar Nikah Menurut Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah” yang diterbitkan di *Al Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 19, No.1, Januari-Juni 2020, mengeksplorasi pandangan Ibn Al-Qayyim terkait status nasab anak luar nikah. Artikel ini membahas pendekatan istinbath hukum yang digunakan oleh Ibn Al-Qayyim dalam menetapkan status hukum nasab anak luar nikah berdasarkan penalaran bayyai dan ta’lilli.¹¹

Keenam, Siti Nur Aqilah Bux dan Mohd Al Adib Samsuri, dalam jurnal “Hak kepada Nasab Kanak-kanak dalam Baby Hatch di Malaysia” yang diterbitkan di *Journal of Islamic Social Science and Humanities*, Vol. 18, May 2019. Membahas masalah nasab bayi yang ditinggalkan di Baby Hatch di Malaysia. Artikel ini mengkaji hak-hak nasab bayi di Baby Hatch menurut undang-undang Malaysia dan syariah, serta implikasi hukum yang muncul terkait status nasab mereka.¹²

Ketujuh, Sakirman yang berjudul “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak” yang diterbitkan di *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, December 2015, membahas peran nasab dalam hukum Islam Indonesia, serta dampaknya terhadap hak-hak anak dan identitas pribadi mereka. Artikel ini menyoroti pentingnya nasab dalam konteks kehidupan keluarga Islam dan implikasinya terhadap pewarisan dan hubungan kekeluargaan.¹³

Kelapan, Tengku Fatimah Muliana Tengku Muda dan rakan-rakan, yang berjudul “Penggunaan DNA bagi Penentuan Nasab al-Walad Li al-Firasy dalam Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia” yang diterbitkan di *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* 2011, membahas penggunaan DNA sebagai metode alternatif untuk menentukan nasab dalam hukum syariah. Artikel

¹¹ Oscar Maulana, “Penetapan Nasab Anak luar Nikah Menurut Pendapat Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah”, *Al Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.19, No.1, Januari-Juni 2020, hlm. 50-61.

¹² Siti Nur Aqilah Bux Binti Sheikh Johari Bux & Mohd Al Adib Samuri, “Hak kepada Nasab Kanak-kanak dalam Baby Hatch di Malaysia”, *Journal of Islamic Social Science and Humanities*, Vol. 18, May 2019, hlm. 166-181.

¹³ Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, December 2015, hlm. 1-20.

ini menyoroti pentingnya penggunaan teknologi modern untuk memperkuat sistem pensabitan nasab dalam kasus nasab anak luar nikah.¹⁴

E. Penjelasan Istilah

Bagi tidak terjadi kesalahpahaman tentang kajian ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam proposal ini antaranya sebagai berikut:

1. Penetapan Nasab

Nasab dari sudut bahasa berasal dari kalimah Arab "نسب" yang bermaksud menisbahkan seseorang kepada ayah. Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat, nasab bermaksud pertalian keluarga atau keturunan, khususnya daripada sebelah ayah.¹⁵ Ia merangkumi hubungan keluarga secara menegak (bapak dan anak) serta melintang (saudara-mara dan ayah saudara). Kebanyakan fuqaha' tidak mentakrifkan nasab secara spesifik, namun Imam Raghīb al-Asfahani mendefinisikannya sebagai persekutuan melalui ibu atau ayah. Nasab adalah asas yang kukuh dalam keluarga, mengikat hubungan berdasarkan kesatuan darah. Menurut ulama seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi, penjagaan nasab adalah salah satu tujuan utama syariah (maqasid syariah), berkaitan dengan penjagaan keturunan dan marwah.¹⁶

2. Anak Luar Nikah

Dalam kamus dewan edisi keempat, mendefinisikan anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah, tidak mendapat pengiktirafan sebagai anak yang dinasabkan kepada bapak biologisnya

¹⁴ Tengku Fatimah Mauliana Tengku Muda dkk, "Penggunaan DNA Bagi Penentuan Nasab al-Walad Li al- Firasy dalam Peruntukan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia", *Jurnal Islam dan Masyarakat kontemporari Keluaran Khas*, 2011, hlm. 17-25.

¹⁵ Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kamus Dewan Edisi Keempat, Maksud "Nasab" 2017. Diakses melalui: <https://prpm.dbp.gov.my/caril?keyword=nasab> pada 26 September 2024.

¹⁶ Pejabat Mufti Wilayah Persektuan, "Bayan Linnas Siri Ke-16: Isu Penamaan "Bin/Binti Abdullah" kepada Anak Tidak Sah Taraf oleh Mahkamah Rayuan". Diakses melalui: <https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas/736-bayan-linnas-siri-ke-106-isu-penamaan-bin-binti-abdullah-kepada-anak-tidak-sah-taraf-oleh-mahkamah-rayuan> pada 26 September 2024.

menurut hukum Islam.¹⁷ Manakala, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan ada mendenfinisikan anak yang dilahirkan hasil dari hubungan luar nikah, seperti zina atau rogol, bukan dari hubungan syubhah. Anak luar nikah juga merujuk kepada anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 saat (taqvim Hijrah) selepas tarikh perkahwinan, kerana tempoh kehamilan sah dalam Islam adalah sekurang-kurangnya 6 bulan.¹⁸

3. Mahkamah Syariah Johor

Mahkamah Syariah Negeri Johor memainkan peranan penting dalam melaksanakan perundangan Islam di Malaysia, khususnya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan umat Islam berdasarkan hukum syarak.¹⁹ Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada pengesahan nasab yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah Johor, yang mempunyai bidang kuasa meliputi seluruh negeri. Mahkamah Tinggi Syariah dipandu oleh beberapa undang-undang penting, termasuk seperti Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Johor) 1997, yang mengatur kesalahan jenayah berdasarkan syariah, Enakmen Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, yang meliputi kasus seperti pertunangan, perkawinan, perwalian, pembubaran perkawinan, poligami dan pengesahan nasab anak. Selain itu, Pasal 61 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003 memberikan Mahkamah Tinggi Syariah kuasa untuk membicarakan kasus-kasus ini, termasuk pengesahan nasab anak, di mana isu nasab diputuskan berdasarkan hukum syarak dan undang-undang yang relevan.

¹⁷ Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kamus Dewan Edisi Keempat, Maksud “Anak luar Nikah”, 2017. Diakses: <https://prpm.dbp.gov.my/Caril?keyword=anak+luar+nikah&d=41812&> pada tanggal 26 September 2024.

¹⁸ Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, “Al-Kafi #1636: Hubungan Anak Luar Nikah Dengan Ibu dan Juga Adik Beradik Perempuan kepada Bapa”, 2020. Diakses melalui: <https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/4258-al-kafi-1636-hubungan-anak-luar-nikah-dengan-ibu-dan-juga-adik-beradik-perempuan-kepada-bapa> pada 1 October 2024.

¹⁹ Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor, 2024. Diakses melalui: [Perkhidmatan – Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor \(mypjit.com\)](http://Perkhidmatan-Jabatan-Kehakiman-Syariah-Negeri-Johor(mypjit.com)) pada tanggal 8 October 2024.

4. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang memiliki pengertian berbeda secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, maslahah berarti manfaat atau kebaikan, sementara mursalah berarti bebas atau tidak terikat. Dalam istilah, maslahah merujuk pada upaya menjaga tujuan syariat, seperti agama, nyawa, akal, nasab, dan harta. Maslahah mursalah didefinisikan sebagai kebaikan yang tidak diatur secara khusus oleh al-Qur'an atau hadits, serta tidak terdapat dalil yang menyatakan pengakuan atau penolakannya, sehingga ia menjadi nilai positif dalam penegakan hukum Islam.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum terkait penetapan nasab anak luar nikah dalam hukum keluarga Islam, dengan mengutamakan bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan data kualitatif melalui wawancara dengan praktisi hukum di Mahkamah Syariah Johor untuk memahami penerapan hukum dalam praktik, menggabungkan analisis normatif dengan wawancara guna menggali teori hukum dan penerapannya.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Enakmen Keluarga Islam Negeri Johor No. 17 Tahun 2003 dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor No. 16 Tahun 2003. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penetapan nasab anak luar nikah dalam hukum keluarga Islam.

²⁰ Ahda Bina, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah Maqashid Syari'ah", 2020. Diakses melalui: [Manhaj Tarjih Muhammadiyah #9: Maqashid Syari'ah \(ahdabina.com\)](http://ahdabina.com) pada tanggal 10 October 2024.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan hukum, yaitu mengkaji norma-norma yang terkandung dalam teks-teks hukum yang mengatur nasab anak luar nikah. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip hukum yang berlaku, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan syariah melalui wawancara dengan narasumber terkait.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi dokumen hukum, seperti Enakmen Keluarga Islam Negeri Johor dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor, serta putusan Mahkamah Syariah yang relevan dengan topik penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengacara syarie, pesuruhjaya sumpah, dan pejabat Mahkamah Syariah Johor untuk menggali informasi terkait penerapan hukum dalam kasus penetapan nasab anak luar nikah. Selain itu, literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel juga digunakan untuk mendalami aspek teori dan praktik hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, dll, maka dalam pengumpulan berbagai data penulis mencari dari berbagai sumber, membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan terutama.

- a. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian menjelaskan, mencatat, dan mentafsirkannya. Proses ini juga melibatkan penghubungan antara dokumen yang ada untuk mendalami isu yang teliti.

- b. Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari narasumber yang terkait dengan topik penelitian. Wawancara ini dilakukan secara daring dengan pengacara syarie dan persuruhjaya sumpah Mahkamah Syariah untuk mendapatkan perspektif dan informasi yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam konteks penelitian.

5. Objektivitas dan Validasi

Untuk memastikan objektivitas dan validitas data, penelitian ini mengandalkan triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan dokumen hukum dan literatur terkait untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi yang diperoleh. Validitas data juga dijaga dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sah serta wawancara dengan narasumber yang memiliki pengalaman langsung dalam penanganan kasus terkait nasab anak luar nikah.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen hukum yang relevan, seperti Enakmen Keluarga Islam Negeri Johor dan putusan Mahkamah Syariah terkait nasab anak luar nikah. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkompeten, seperti pengacara syarie dan pejabat Mahkamah Syariah, untuk mendapatkan pandangan langsung mengenai penerapan hukum dalam kasus-kasus tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam praktik. Dengan teknik analisis ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan hukum nasab anak di Mahkamah Syariah Johor, baik dari sisi teori maupun praktik.

7. Pedomen Penulisan

Dalam proposal ini penulis memberikan atau mengacu pada buku pedomen penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

Bab satu ini merupakan pengantar umum terhadap masalah yang akan dibahas terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua Mengenai pembahasan pengertian penetapan nasab anak, pengertian anak luar nikah, dasar hukum penetapan nasab anak luar nikah dan kemaslahatan penetapan nasab anak luar nikah.

Bab tiga membahaskan hasil peneltian dan pembahasan mengenai tentang profil Mahkamah Syariah Johor, alasan-alasan pemohon mengajukan penetapan nasab anak luar nikah dan pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Johor dalam perkara penasaban anak luar nikah.

Bab keempat ini merupakan akhir dari semua bab yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menjelaskan inti dari bahasan dalam penelitian atau dapat juga dikatakan sebagai rangkuman dari pembahasan penelitian.